

No	Jenis Kendala	Deskripsi Rinci	Dampak terhadap Penegakan Hukum
1	Sumber Daya Manusia (Aparat Penegak Hukum) Sangat Terbatas	Polisi Kehutanan. Tidak sebanding dengan luas area TAHURA seluas 27.868,30	Patroli kurang maksimal, sehingga masih banyak kawasan yang seringkali kurang terpantau
2	Sarana dan Prasarana Minim	Keterbatasan teknologi pengawasan, bahkan sebagian belum ada drone, sensor, maupun sistem monitoring real-time. Anggaran operasional terbatas.	Pengawasan hanya manual, rawan kecolongan pelanggaran, sulit mendeteksi kelompok trail yang masuk secara terorganisir
3	Koordinasi Antar Instansi Lemah	Balai TAHURA, Polhut, dan Polri belum memiliki mekanisme terpadu. tanpa sistem pelaporan terintegrasi.	Tindakan hukum sering tidak konsisten, pelaku lolos dari jerat hukum.
4	Kendala Administratif dan Proses Hukum	Proses hukum panjang dan rumit, pembuktian kerugian ekologis sulit (parameter kerusakan tidak jelas dalam UU No. 32/2024).	Banyak kasus berhenti di teguran administratif, tanpa efek jera.
5	Kesadaran Hukum Masyarakat Rendah	Masyarakat lokal menganggap kawasan TAHURA bisa dimanfaatkan bebas. Minim sosialisasi aturan konservasi.	Masyarakat tidak mendukung penegakan hukum, bahkan cenderung membiarkan terhadap pelanggaran trail.
6	Budaya Hukum Lemah	Aktivitas trail di kawasan konservasi sering dianggap hiburan normal.	Normalisasi pelanggaran, masyarakat tidak merasa bahwasannya trail diarea kawasan konservasi adalah perbuatan melanggar hokum.

Tabel 1. Kendala Penegakan Hukum Aktivitas Trail di Kawasan Konservasi TAHURA Raden Soerjo